



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 18 Mei 2016 06:00

Proyek Reklamasi Pantai Namlea, Diduga Libatkan Bupati



AMBON - Bupati Pulau Buru, Ramli Umasugi diduga terlibat dalam proyek pembangunan water front city tahap I, terkait pekerjaan reklamasi pantai Merah Putih di Namlea yang diduga sarat penyimpangan.

Pembangunan proyek APBN yang dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum Buru tahun 2015 sebesar Rp 4.911.700.000, itu ternyata tidak didukung dengan peraturan daerah maupun rencana pembangunan daerah dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Buru.

“Kami sudah cek semuanya, namun tidak ada dalam Perda, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, proyek ini tidak ada izin Amdal dari badan lingkungan hidup Kabupaten Buru. Proyek ini terkesan akal-akalan untuk mencari untung,” kata Alwi Mukadar kepada Kabar Timur, Senin, kemarin.

Bukan saja itu, dia menjelaskan, proyek tersebut juga tidak mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan PP Nomor 27 Tahun 2013 tentang lingkungan.

Tak hanya itu, pembangunan asal-asalan juga tidak sesuai Permenteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, Nomor 8 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan lingkungan hidup dan tatalaksana penilaian dan pemeriksaan dokumen Amdal.

Buktinya, musim penghujan, rumah penduduk akan terendam air. “Bupati Buru dalam menentukan pembangunan sama sekali tidak memiliki payung hukum sebagaimana diatur dalam UU maupun peraturan lainnya. Sehingga lingkungan sekitar pembangunan rawan jika tiba musim hujan,” ujar dia.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Dia berharap instansi berwenang maupun aparat penegak hukum dapat meminta pertanggungjawaban Bupati terkait penggelontoran dana Rp 5 Miliar yang diberikan kepada adik kandungnya, Sahran Umasugi yang juga anggota DPRD Buru untuk mengerjakan proyek tersebut.

Ironisnya, tambah dia, dalam rapat jajaran Pemkab Buru, Bupati menganulir semua tuduhan tersebut. Sebab, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Maluku tidak menemukan adanya kerugian Negara dan menyatakan proyek itu selesai 100 persen, sehingga pemberitaan itu tidak benar. “Dalam rapat dengan stafnya pada tanggal 10 Mei 2016 lalu, Bupati menyampaikan jika BPK sudah sampaikan proyek itu selesai. Kalau memang seperti itu, maka BPK perlu dipertanyakan. Lantaran anak kecil juga akan tahu bila melihat hasil kerja dari proyek tersebut,” terangnya.

Menurutnya, terkait dengan pemberitaan menyangkut proyek yang diduga fiktif dan merugikan Negara miliaran rupiah, tim dari BPK Maluku kembali datang ke Namlea untuk mengkroscek ulang proyek itu.

Tim yang datang mengunjungi proyek untuk kedua kalinya itu dipimpin Ketua BPK. “Menurut Bupati, BPK sudah nyatakan proyek selesai, lalu kenapa BPK kembali datang ke Namlea melihat kembali proyek itu. Saat itu BPK datang pada tanggal 14 Mei 2016 lalu,” ungkapnya.

Dia mengingatkan kepada BPK untuk tidak “masuk angin” dalam mengungkap proyek yang secara nyata dikerjakan tidak sesuai mekanisme bahkan tidak tertuang dalam Perda Buru. “BPK harus audit mulai dari perencanaan. Jika perencanaan tidak ada maka sudah tentu proyek itu fiktif. Tapi kalau ada, baru lakukan audit fisik serta perijinan lainnya,” jelasnya.

Informasi lain yang dihimpun Kabar Timur dari Namlea menyebutkan, diduga saat ini pekerjaan tahap II sudah mulai bergulir. Sebab, para pekerja proyek terlihat sudah kembali beraktifitas. “Mungkin pekerjaan tahap II sudah jalan, karena pekerja terlihat sudah menyusun batu,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan water front city tahap I, pekerjaan reklamasi pantai Merah Putih di Namlea, Kabupaten Buru, resmi dilaporkan ke aparat penegak hukum. Proyek APBN yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Buru tahun 2015 sebesar Rp 4.911.700.000, diduga sarat penyimpangan.

Kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan Ditreskrimsus Polda Maluku pada 9 Mei 2016. “Kami juga sudah memasukan laporan ke Mahkamah Agung dan KPK di Jakarta,” ungkap Alwi Mukadar, tokoh masyarakat Buru kepada Kabar Timur, kemarin.

Menurutnya, isi surat resmi yang telah dimasukan sebagai laporan tersebut meminta aparat penegak hukum mengusut proyek yang dikerjakan CV Aego Media Pratama. Akibat perbuatannya, perusahaan milik anggota DPRD Buru Sahran Umasugi dianggap telah merugikan negara miliaran rupiah. “Kami berharap, aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduan yang telah kami sampaikan,” katanya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sementara itu, Kepala Seksi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulete yang dikonfirmasi terkait laporan yang telah dimasukkan tersebut mengaku belum mengetahuinya. “Nanti saya cek suratnya sudah masuk sampai di mana,” terangnya.

Menurutnya, biasanya jika ada laporan pengaduan yang masuk tidak langsung diketahui oleh bagian penerangan. Tetapi jika sudah sampai pada bagian Pendum baru pihaknya diberitahukan. “Biasanya kalau surat masuk ada tahapannya. Nanti saya cek dulu apakah sudah sampai di Pendum atau belum,” ujar dia.

Di sisi lain, Samy memberikan apresiasi terkait laporan tersebut. “Itu bagus, itu tandanya warga juga turut berperan dalam memantau berbagai aktivitas yang dianggap menyimpang,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Jan Samuel Marinka didesak untuk mengusut proyek reklamasi pantai Merah Putih di Namlea, Kabupaten Buru. Pembangunan water front city tahap I itu diduga kuat fiktif atau tidak dikerjakan.

Proyek tahap I dianggarkan oleh Dinas PU Buru melalui APBN tahun 2015 sebesar Rp 4.911.700.000, dikerjakan oleh CV Aego Media Pratama. Anggaran itu diperuntukan bagi pekerjaan pemancangan tiang dan penimbunan kawasan Pantai Merah Putih. Ternyata hingga saat ini proyek pemancangan tiang tidak pernah dikerjakan, namun pekerjaan dinyatakan rampung 100 persen.

Meski fiktif, anggaran pekerjaan pemancangan tiang sebesar Rp 2,6 miliar telah dicairkan oleh Dinas PU Buru. Dana proyek tiang pancang kini telah dinikmati Bos CV Aego Media Pratama, Sahran Umasugi. Sahran merupakan anggota DPRD Kabupaten Buru yang juga adik kandung Bupati Buru, Ramli Umasugi. (CRI)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 18 Mei 2016 06:00

Adu Kuat di Gunung Botak, PT BPS Komitmen CSR



AMBON - Aktivitas penambangan liar emas di gunung Botak, Kabupaten Buru telah ditutup. Tidak ada aktivitas penambangangan di areal itu. Hanya saja, saat ini ada aktivitas pengangkatan sedimen akibat penambangan liar yang mengandung Sianida dan Merkuri di kaki gunung Botak.

Ada dua perusahaan di percayakan Pemerintah Provinsi Maluku mengangkat sedimen di kaki gunung Botak. Dua perusahaan itu adalah, PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) dan PT Cita Cipta Prima (CCP). Hanya saja, dua perusahaan ini menampung sedimen dengan cara berbeda.

Pantauan Kabar Timur di areal penampungan sedimen PT BPS menampung material di lokasi sekitar lima hektar. Sekitar dua hektar digunakan untuk penampungan material yang mengandung Sianida dan Merkuri, dua hektar digunakan untuk bengkel dan parkir mobil truk dan alat berat, dan satu hektar lainnya untuk mes dan perkantoran.

Di lokasi penampungan material yang mengandung Sedimen dan Merkuri, tampak alat berat sementara meratakan material yang ditumpuk puluhan dam truk. Di kaki penampungan material dibuat selokan atau pipa mengelilingi tumpukan material.

”Ini agar hujan air yang mengalir dari tumpukan material yang mengandung Sianida dan Merkuri disalurkan dan ditampung di kolam penampungan,”kata salah satu staf PT BPS, Risno sambil menunjuk kolam besar beralaskan tarpal yang sementara terisi air.

Dia mengaku, kolam itu beralaskan tarpal untuk air yang mengandung Sianida dan Mercury tidak tembus ke tanah dan tidak mencemari wilayah itu. ”Jadi kegiatan kami dipantau langsung Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup. Kami selalu mematuhi aturan main soal pertambangan,”sebutnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Tak hanya itu, mes karyawan dan perkantoran dibangun terpisah dengan tumpukan material yang telah ditaksir puluhan ribu kubik. Mes dan kantor PT BPS dibangun dibatasi sungai kering. Kondisi mes dan kantor terlihat representatif dan ramah lingkungan.

Sementara pantauan di lokasi penampungan material yang mengandung Sianida dan Merkuri PT CCP di areal perbukitan dengan lokasi yang sangat sempit atau tidak sampai setengah hektar. Akibatnya, material yang ditampung dan dipagari seng ketika hujan Sianida dan Merkuri mengalir ke dataran rendah.

Cilakanya, sejumlah material tumpah atau keluar dari pagar seng yang rusak. "PT CCP sangat tidak profesional dalam mengangkut Sianida dan Merkuri. Kok katanya angkat sedimen agar Sianida dan Merkuri tidak mencemari wilayah itu, tapi justru material yang diangkut mencemari lingkungan," kata sumber Kabar Timur.

Ironisnya, mes dan kantor PT CCP dibangun di dekat sedimen yang belum diangkat. Bangunan mes dan kantor berhimpitan dan berukuran kecil. Sejumlah karyawan mengaku, mes dan kantor PT CCP tidak memiliki toilet. "Apalagi, karyawan PT CCP sering mogok karena tidak mendapat gaji," sebutnya.

KOMITMEN CSR PT BPS

Selain dipercayakan mengangkat material yang mengandung Sedimen dan Sianida, PT BPS juga memiliki kepedulian atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah itu.

"Kami sudah bangun jalan dari Hanoni sampai di Wamsaid. Jadi ruas jalan itu dibangun PT BPS dan PT CCP. Kita bersama-sama melakukan perawatan dan perbaikan jalan," kata Manajer Operasional PT BPS Bambang Riadi kepada Kabar Timur secara terpisah.

Namun, ingat dia, perbaikan ruas jalan Hanoni sampai di Desa Kayeli murni dilakukan PT BPS. "Kalau dari Hanoni ke Wamsaid kurang lebih 3 kilo. Dari Hanoni ke Desa Kayeli sekitar 10 kilo meter. Pokoknya jalan rusak kita lakukan perawatan," jelasnya.

Dia mengaku, selain kepentingan operasional perusahaan, pihaknya juga dari CSR jalan. "Kita membantu dan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi penambangan. Termasuk ada areal kolam di Desa Kayeli yang direncanakan untuk semacam alun-alun kota, sementara ditimbun. Saat ini sekitar 50 persen. Itu murni dari PT BPS," terangnya.

Apalagi, sebutnya, pernah salah satu pimpinan DPRD Maluku mengkonfirmasi ke Kepala Desa Kayeli kalau ada kontribusi dari PT BPS di Desa yang merupakan ibukota kecamatan Teluk Kayeli. Tak hanya itu, PT BPS dalam merekrut karyawan, 90 persen lebih adalah masyarakat lokal. "Kita utamakan masyarakat sekitar," sebutnya.

Tak hanya itu, Bambang mengaku, pihaknya juga menyalurkan bantuan di sejumlah rumah ibadah di daerah itu. "Selain bantuan kepada rumah ibadah, kita juga membantu organisasi



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

kemasyarakatan. Kita ikut berpartisipasi dan berlangsung cukup lama. Kita tunjukan komitmen dan kepedulian kepada masyarakat. Sarana prasarana perusahaan digunakan untuk perbaikan lingkungan desa dan jalan,”pungkasnya. **(KTM)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jumat, 20 Mei 2016 06:00

Galang Koalisi Anti Korupsi, INFIT Pressure KPK Jadikan OG Tersangka



PETAKA baru terjadi di tahun anggaran 2015 setelah OG merekomendasikan kontraktor asal Papua mengarap paket proyek jalan di Kabupaten Buru. Perannya disejumlah paket proyek jumbo di BPPJN Maluku-Maluku cukup terang.

Institut For Indonesia Integrity (INFIT), yang bermarkas di Jalan Rasuna, Jakarta, tidak tinggal diam, untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut tuntas kasus suap “judi proyek” di Maluku yang dilakukan Damayanti Cs, yang hingga saat ini belum ada satupun tersangka dari pihak Kementerian PURR.

“Bidang data dan riset INFIT, telah beberapa kali melakukan riset dan investigasi langsung di lapangan. Ini kita lakukan untuk memperkuat KPK dalam mengungkap tuntas kasus ini. Peran pejabat di Kementerian PURR jadi fokus investigasi kami,” tegas Direktur Eksekutif INFIT, Abdul Haji Talaohu menjawab Kabar Timur di Jakarta, Kamis, kemarin.

Dari data dan riset investigasi lapangan yang dilakukan INFIT menemukan bahwa jual beli paket-paket proyek di Kementerian PURR, lewat Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN), Maluku-Maluku Utara, sudah terjadi sejak tahun 2015, ketika Sekretaris Bina Marga, Kementerian PURR, dijabat Ober Gultom alias OG, yang adalah mantan Kepala BPJJN Papua.

“Peran OG di proyek jalan dan jembatan tahun anggaran 2015, di BPJJN Maluku-Maluku Utara cukup terang. Apakah atasan OG juga terlibat, tentu ini menjadi domain penyidik KPK untuk mendalami korelasi antara paket-paket suap proyek yang sementara ini menjerat Damayanti Cs. Bagi INFIT modus di tahun 2015 sama persis dengan yang terjadi di tahun 2016,” paparnya.

Dia mengatakan, INFIT memiliki data-data yang valid langsung dari lapangan. Karena itu, lanjut dia, untuk mendukung KPK, INFIT berencana mengandeng sejumlah lembaga anti korupsi di



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jakarta, seperti ICW, FITRA, LIRA dan lain-lain mendorong KPK, agar berani menetapkan OG sebagai tersangka di kasus jual beli proyek di BPJN Maluku-Maluku Utara.

Penetapan, OG sebagai tersangka bagi INFIT menjadi penting, mengingat data-data yang dimiliki INFIT cukup terang, asal, lanjut dia, KPK berani membuka keterlibatan OG, pada proyek tahun 2015 yang berjumlah ratusan miliar. “Dengan menetapkan OG tersangka di kasus ini KPK bakal membongkar penerima suap lainnya di jajaran Kementerian PURR,” beber Ajis.

Dalam mengemas laporan keterlibatan OG di judi proyek tahun 2015 dan 2016, di Maluku, kata Ajis, INFIT menyedorkan temuan tiga paket proyek jalan di Kabupaten Buru, yang hingga kini tidak tuntas.

“Ketiga paket proyek itu berjumlah ratusan miliar. Nah, proyek-proyek itu dikerjakan kontraktor asal Papua yang diboyong OG. Ini data dan fakta yang kami temukan di lapangan. Untuk lengkapnya, kita akan buat dalam laporan resmi ke KPK. Makanya kita minta dukungan lembaga-lembaga anti korupsi di Jakarta,” terang Ajis lagi.

Laporan yang akan diserahkan kepada KPK ini, kata Ajis, bukan data bodong. “Kami juga akan sertakan nama sejumlah pengusaha yang siap menjadi saksi dalam mengungkap peran OG di tiga paket proyek yang ada di Kabupaten Buru, maupun paket-paket lainnya,” papar Ajis lagi.

Menurutnya, sejak BPJN Maluku-Maluku Utara dibentuk, setiap proyek jalan dan jembatan misalnya, di Pulau Buru, yang digarap dari tahun ke tahun oleh kontraktor lokal selalu tuntas, tanpa ada masalah.

Petaka itu, kata Ajis, baru terjadi di tahun anggaran 2015 setelah OG merekomendasikan kontraktor asal Papua menggarap paket-paket jumbo proyek jalan di Kabupaten Buru. “Ketiga paket proyek tidak tuntas hingga berakhir tahun anggaran. Bahkan, kontraktor lokal disubkan untuk membereskan pekerjaan itu. Itu hanya satu paket. Sementara dua paketnya belum kelar hingga saat ini,” bongkar Ajis.

Nama-nama sejumlah pengusaha yang direkomendasikan INFIT untuk dimintai keterangan seputar keterlibatan OG, akan menjadi pintu masuk bagi penyidik KPK dalam membongkar skandal OG di pelbagai paket proyek di BPJN Maluku-Maluku Utara. Bahkan, INFIT berpendapat bila OG tidak dijadikan tersangka praktek busuk jual beli proyek akan jedah sesaat, selanjutnya akan kembali berjalan. (TPI)



Rabu, 25 Mei 2016 06:00

Kejati “Diamkan” Kasus Reklamasi Pantai Namlea



AMBON - Meski telah resmi dilaporkan, Kejaksaan Tinggi Maluku belum bergerak mengusut dugaan korupsi proyek reklamasi pantai di Kota Namlea, Kabupaten Buru. Bahkan laporan tertulis yang disampaikan warga Namlea ke Kejaksaan Tinggi Maluku pada awal Mei lalu hingga kini belum diketahui nasibnya.

Hal ini terungkap dari penjelasan Kepala Seksi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulete yang dikonfirmasi Kabar Timur, Senin (23/5). “Saya belum tahu laporan itu, nanti saya cek dulu,” kata Samy.

Jawaban yang sama juga dilontarkan Samy, pekan kemarin. “Nanti saya cek suratnya (laporan warga) sudah masuk sampai di mana,” terangnya, Senin (16/5) lalu.

Lambannya sikap Kejati Maluku merespon laporan warga Namlea dikecam oleh Alwi Mukadar, seorang tokoh masyarakat Namlea. Sikap itu kata dia membuktikan Kejati Maluku tidak memiliki komitmen penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Kabupaten Buru.

“Kalau tanggapannya seperti itu, katong kecewa dengan Kejati Maluku. Ini ada apa, masa laporan sudah dimasukan dua pekan lalu belum ditindaklanjuti, kok jawabannya terus-terusan akan dicek. Itu tandanya mereka tidak cek,” kecamnya, kemarin.

Dia mendesak Kejati mengungkap kasus tersebut karena diduga negara mengalami kerugian miliaran rupiah dari proyek pembangunan water front city tahap I tahun 2015. “Kami punya data banyak terkait kasus korupsi di Namlea. Kami akan buka satu per satu, kami akan cicil, jika laporan awal kami ini diproses,” katanya.

Bahkan, lanjut Alwi, masyarakat Namlea siap untuk menjadi saksi. Bukan saja untuk kasus yang sudah resmi dilaporkan tersebut, namun siap menjadi saksi terhadap kasus-kasus lainnya yang



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

selama ini terjadi. “Kami di sini sudah siap menjadi saksi dan akan memberikan berbagai data terkait kasus korupsi di sini (Namlea),” katanya.

Dia meminta Kejati Maluku tidak “masuk angin”, sebab, banyak proyek fiktif yang terjadi di Kabupaten Buru melibatkan pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.

Laporan warga Namlea ke Kejati Maluku sehubungan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan water front city tahap I. Proyek meliputi reklamasi dan pemancangan tiang di pantai Merah Putih di Namlea.

Proyek dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Buru bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp 4.911.700.000. Nilai anggaran proyek reklamasi sebesar Rp 2,3 miliar, sedangkan pemancangan tiang Rp 2,6 miliar.

Proyek reklamasi dan pemancangan tiang dikerjakan oleh CV Aego Media Pratama milik anggota DPRD Buru, Sahran Umasugi. Sahran juga merupakan adik kandung Bupati Buru, Ramli Umasugi.

Kontrak kerja CV Aego Media Pratama tertuang dalam SPMK No:000.07/SPP-PSDA/DPU-KB/2015 tertanggal 3 September 2015. Pengawas dan penanggungjawab lapangan proyek ini, yaitu Munir Leksoin.

Ternyata hingga saat ini proyek pemancangan tiang tidak pernah dikerjakan, namun pekerjaan dinyatakan rampung 100 persen. Meski fiktif, anggaran pekerjaan pemancangan tiang sebesar Rp 2,6 miliar telah dicairkan oleh Dinas PU Buru. Proyek reklamasi pantai yang seharusnya menggunakan tanah pilihan, diganti dengan limbah buangan dari bandara Namniwel Sawa.

Pekerjaan utama berupa pemancangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter. Tapi tidak dikerjakan, tidak ada tiang yang dipasang. Pihak rekanan hanya menggantinya dengan menimbun batu dari buangan bandara Namniwel Sawa.

Untuk pekerjaan pemancangan tiang sesuai data pelelangan, menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar. Tetapi ironisnya tidak ada satu pun tiang berdiameter 60 centimeter, sebanyak 300 tiang yang dipasang satu pun.

Jika dihitung, total keseluruhan pekerjaan reklamasi pantai dan tiang pancang hanya menghabiskan Rp 1 miliar dari nilai kontrak Rp 4,9 miliar.

Menurut Mukadar indikasi korupsi proyek ini dimulai dari proses lelang. Diduga telah terjadi kongkalikong antara panitia lelang di Dinas PU Buru dengan CV. Aego Media Pratama. Proses lelang hanya formalitas, sebab sejak awal di kalangan pengusaha jasa konstruksi telah tersebar kabar CV. Aego Media Pratama, keluar sebagai pemenang lelang.

“Sejak awal pelelangan saja sudah salah. Karena sesuai dokumen pelelangan, perusahaan ini (CV. Aego Media Pratama) kualifikasinya K1 atau perusahaan pemula yang hanya dapat mengerjakan



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

proyek bernilai Rp 1 juta-100 juta. Sementara proyek sebesar ini harusnya dikerjakan oleh perusahaan besar dengan kualifikasi M1 atau level PT dan sudah memiliki pengalaman,” ujar Mukadar.

Akibat proyek tiang pancang fiktif dan proyek timbunan dikerjakan sesuka hati pihak kontraktor, negara dirugikan miliaran rupiah. Pejabat yang dianggap bertanggung jawab dalam proyek ini sebut sumber adalah ketua panitia lelang/tender Atika Wael bersama empat anggota panitia lelang, Kepala Dinas PU Buru Puji Wahono sebagai pengguna anggaran, pejabat pembuat komiitmen (PPK), direksi dan pengawas proyek, konsultan perencanaan dan panitia pemeriksaan fisik.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Devisi data dan investigasi Institut For Indonesia Integrity (INFIT), Ahmad Sueb memberikan apresiasi positif atas laporan resmi warga di Kabupaten Buru, terhadap proyek pembangunan water front city di Kota Namlea.

“Laporan ini harus mendapat perhatian serius Kejati Maluku. Semua komponen anak daerah maupun lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan gerakan anti korupsi mesti mendukung penuh laporan itu. Dukungan ini penting untuk menghindari intevensi kekuasaan dalam menghadang upaya-upaya penyelidikan yang dilakukan jaksa,” kata Ahmad Sueb yang dihubungi Kabar Timur via telepon selulernya, tadi malam.

Dikatakan, dukungan lembaga-lembaga anti korupsi, dan juga pers menjadi penting dalam memberikan nutrisi bagi penegak hukum melakukan pengusutan terkait proyek reklamasi pantai tahap satu yang diduga kuat fiktif itu. Apalagi, lanjut dia, disebut-sebut milik seorang wakil rakyat bernama Sahran Umasugi.

“Kasus ini harus dibongkar. Jangan sampai ada intevensi kekuasaan, seperti kasus GOR dan kasus korupsi pengadaan alat-alat pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Ambon. Dimana orang-orang yang bertanggung jawab dalam proyek itu sengaja dihilangkan. Saya berharap kasus dugaan proyek reklamasi pantai Namlea tahap satu, tidak demikian,” paparnya.

Aktivis anti korupsi yang kerap melakukan riset dan investigasi terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Maluku, bersama INFIT yang kini tengah mempersiapkan laporan resmi ke KPK, atas dugaan keterlibatan Sekretaris Dirjen Bina Marga, Kementerian PURR Ober Gultom, terhadap judi proyek di Balai Perlaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN), Maluku-Maluku Utara, laporan soal dugaan proyek reklamasi dapat dibongkar bila penyidik profesional.

Menurutnya, dana proyek dimaksud yang mendekati angka Rp 5 miliar dan hanya dikerjakan perusahaan jasa konstruksi dengan bendera CV dan bukan PT, menunjukkan bahwa proyek ini ada “kekuatan besar” dibaliknya. “Artinya kalau proyek ini ditender secara fair, tanpa intervensi “kekuatan besar” tadi, maka perusahaan yang berbendera CV tidak akan lolos mengerjakan proyek di maksud,” paparnya.

Perusahaan jasa kontruksi berbendera CV memiliki standar tertentu yang sudah diatur dalam pelbagai peraturan menyangkut pekerjaan fisik maupun pengadaan. “Sangat tidak rasional bila



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

proyek dengan nilai Rp 4,9 miliar dikerjakan perusahaan dengan label CV. Saya yakin tender proyek ini sekedar formalitas saja,” terangnya.

Untuk memastikan, kebenaran dari laporan itu, lanjut dia, Kejati Maluku, harus memulai memeriksa daftar perusahaan yang ikut tender di proyek itu. “Untuk menemukan skandal proyek ini penyidik harus memulai penyelidikan dengan membuka kembali daftar perusahaan yang ikut tender diproyek itu. Disitu dengan sendirinya akan terbongkar kongkalikong antara panitia tender dengan pemenang proyek yakni Sahran Umuasugi,” bebarnya. Apalagi lanjut dia, Sahran Umasugi adalah wakil rakyat yang merupakan adik kandung dari bupati Buru. (MG1)